LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Jalan Jenderal Suharto No. 7 Kalierang Wonosobo
Telp./Fax (0286) 322908
Wonosobo 56361

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019. LKjIP BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP BPBD Kabupaten Wonosobo.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Wonosobo telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Capaian ketiga indikator kinerja utama BPBD Kabupaten Wonosobo telah memenuhi kriteria sangat baik. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

Meskipun semua indikator sudah tercapai, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan demi mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja sektor penanggulangan bencana di masa mendatang.

Wonosobo, Januari 2020

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Wonosobo

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ZULFA AKHSAN ALIM K, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19761127 199511 1 001

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LKjIP BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2019. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2019.

Sebagai perwujudan pelaksanaan *good governance*, BPBD Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021. Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2019. Ada 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai yaitu:

1. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi; dan
2. Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan.

Selanjutnya diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU). Indikator kinerja utama tersebut, yaitu:

1. Indek Resiko Bencana;
2. Raport Ketangguhan Bencana; dan
3. Nilai Evaluasi SAKIP BPBD.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi, maka dapat diresume sebagai berikut :

1. Hasil pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2019, yaitu :
   a. Indek Resiko Bencana : 101,35% (Sangat Baik);
   b. Rapor Ketangguhan Bencana : 68,00% (Cukup);

Dipindai dengan CamScanner

c. Nilai Evaluasi SAKIP BPBD : - (Belum Dinilai)

Untuk memenuhi berbagai indikator tersebut sangat diperlukan dukungan kebijakan yang semakin kuat terutama dari Pemerintah Kabupaten dan stakeholder terkait. Hal ini mengingat peran strategis dan sekaligus berat yang diampu oleh BPBD. Berbagai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor tidak pernah bisa terlepas dari resiko terlanda dan terdampak bencana. Dukungan tersebut antara lain berupa peningkatan kuantitas dan kualitas personel/SDM, penguatan anggaran dalam rangka pemenuhan kegiatan-kegiatan Pra, Kedaruratan maupun Pasca Bencana serta pemenuhan berbagai sarana dan prasarana pendukung operasi.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Gambaran Umum Organisasi 2

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Wonosobo 7

1.5 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1 Renstra BPBD Kabupaten Wonosobo..... 10

2.2 Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 19

3.2 Realisasi Anggaran 25

BAB IV PENUTUP 28

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo 28

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang 28

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo. LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan LKjIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan

Dipindai dengan CamScanner

yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKjIP BPBD Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LkjIP, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

BPBD Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4) dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Daftar Pegawai BPBD Kabupaten Wonosobo

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	ZULFA AKHSAN ALIM KURNIAWAN,S.STP,M.Si	19761127 199511 1 001	Pembina Tk I (IV/b)	KALAK BPBD
2	MUJIONO, S.Sos,MM	19620219 199103 1 006	Pembina (IV/a)	Sekretaris BPBD
3	WIYOGO,S.Pd	19640915 198608 1 001	Pembina (IV/a)	Kasi Kesiapsiagaan dan pencegahan
4	SULTONI, SP	19630605 198610 1 004	Pembina Tk I (III/d)	Kasi Kedaruratan dan logistik
5	SUBROTO, SE	19740911 201001 1 003	Penata (III/c)	Kasi Rehab dan rekon
6	SOEGIRI	19631108 198603 1 020	Penata Tk I (III/d)	Bendahara kegiatan
7	SUSMAN HIDAYAT	19620422 198703 1 007	Penata Tk I (III/d)	Pelaksana
8	ABDUL HALIM	19811214 200501 1 003	Pengatur (II/ d)	Bendahara gaji
9	HARI HARDJANTO	19700825 200701 1 022	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran
10	SUKIRMAN	19730223 200801 1 005	Pengatur (II/c)	Pelaksana
11	SLAMET GUNADI	19750616 200901 1 005	Juru (I/ c)	Pelaksana
12	TABAR	19690802 200901 1 015	Juru (I/ c)	Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner

13	ATO IHTIARTO	19670225 199803 1 003	Penata Muda (III/a)	Pelaksana (Damkar)
14	JOKO SUPRIYANTO	19710916 200212 1 004	Pengatur Tk I (II/d)	Pelaksana (Damkar)
15	MISBAH	19620830 198503 1 005	Pengatur (II/ c)	Pelaksana (Damkar)
16	CHABIB SUHARDI	19670128 200604 1 003	Pengatur (II/ c)	Pelaksana (Damkar)
17	DJURAYMI	19641030 200604 1 001	Pengatur (II/ c)	Pelaksana (Damkar)
18	MOCHAMAD JAUHARI	196708022006041009	Pengatur (II/ c)	Pelaksana (Damkar)
19	SUPRIYADI	19701129 200701 1 010	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana (Damkar)
20	MUHSIN	19640806 200604 1 006	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana (Damkar)
21	SOBAR	19720919 200801 1 002	Juru Tingkat I (I/d)	Pelaksana (Damkar)
22	SUPANGAT	19630405 200801 1 002	Juru Tingkat I (I/b)	Pelaksana (Damkar)
23	RAKHMAT	19680221 200801 1 002	Juru Tingkat I (I/b)	Pelaksana (Damkar)
24	BADERUN	19710708 200901 1 003	Juru Tingkat I (I/b)	Pelaksana (Damkar)

PEGAWAI NON - PNS

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	BUDI PURNOMO	Petugas Pusdalops
2	SULIS	Petugas Pusdalops
3	RULIYANTO	Petugas Pusdalops
4	ZAENAL AR	Petugas Pusdalops
5	SABARNO	Petugas Pusdalops
6	INDRA SURYANTAKA	Petugas Pusdalops
7	SUTRISNO	Petugas Pusdalops
8	MAHRUN SAJIONO	Petugas Pusdalops
9	MELIANA KURNIAWAN	Petugas Pusdalops
10	YUNDAL IBNU	Petugas Pusdalops
11	INDAH KARTIKA CAHYANI	Petugas Pusdalops
12	WARDIYONO	Petugas Pusdalops
13	GRISELA FEBRIAWAN	Petugas Pusdalops
14	WARDIYONO	Petugas Pusdalops
15	RULIYANTO	Petugas Pusdalops
16	SYAEFUL UMAM	Petugas TRC
17	PANGGUNG PRASETYO H	Petugas TRC
18	TURYONO	Petugas TRC
19	RENI LESTARI	Staf Administrasi
20	HARYADI	Petugas Kebersihan

Dipindai dengan CamScanner

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Wonosobo dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi, adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 10 (sepuluh) unit;
2. Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 sebanyak 22 (dua puluh dua) unit.

Inventaris Kendaraan Dinas Roda 4

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun	Nomor Polisi	Kondisi (B,KB,RB)
1	Jeep MPNP	Chevrolet Trooper	1995	AA 9501 VF	B
2	Station Wangon/Toyota	Toyota Rush	2007	AA 9503 CF	B
3	Runsus/L.TR Pemadam Kebakaran	Toyota	2003	AA 9591 F	B
4	Runsus/L.TR Pemadam Kebakaran	Toyota	1983	AA 9597 F	RB
5	Runsus/L.TR Pemadam Kebakaran	Mitsubishi	2006	AA 9595 F	B
6	Runsus/L.TR Pemadam Kebakaran	Mitsubishi	2006	AA 9596 F	B
7	Pick Up	Toyota Kijang	2006	AA 9569 F	B
8	Runsus TENGKI	DYNA	2015	AA 9536 AF	RB
9	Truck + Attachment	TOYOTA HILUX	2015	AA 9568 F	B
10	Pick Up	Toyota Hilux 2.5 D-CAB	2015	AA 9585 DF	B
11	Mobil Ambulance	Dyna	2004	AA 9588 HF	B
12	Mobil Ambulance	L300	2004	AA 1951 HF	B
13	MOBIL KIJANG	TOYOTA KIJANG	1996	AA 9500 FF	B
14	MOBIL BUS	MITSUBIHSI	1996	AA 9511 F	B
15	MOBIL TRUCK	HINO	1987	AA 9530 GF	B
16	MOBIL COLT	MITSUBISHI L300 GB	1990	AA 9505 KF	B
17	Mobil Pemadam Kebakaran	HINO	2019	B 2543 XAU	B
18	Mobil Tangki Air	HINO	2019	B 2542 XAU	B
19	Sedan	Toyota Corolla	1996	AA 75 F	B
20	Double Cabin	Isuzu D-MaxRodeo	2015	AA 9582 AF	B
21	Mobil Ambulance	Daihatsu	2018	AA 9598 FF	B
22	Mobil Siaga	Daihatsu Grand Max	2018	AA 9508 YF	B

Sarana dan prasarana untuk kondisi tertentu

No	Kode	Jenis Peralatan	Jumlah (Unit)
I	**01**	**Alat Transportasi**	
		1 Mobil Evakuasi	1
		2 Mobil Pemadam Kebakaran	6
		3 Mobil Operasional	8
		4 Mobil Rescue	1

Dipindai dengan CamScanner

		5 Motor Trail	2
		6 Pick Up	1
		7 Truk Tangki Air	2
II	**02**	**Alat Komunikasi**	
		1 HT	36
		2 RIG	2
		3 GPS	5
		4 Wireless	1
		5 Megaphone	5
		6 Camera Digital	3
III	**03**	**Alat pencarian, penyelamatan dan evakuasi**	
		1 Life Jacket/Rompi Pelampung	42
		2 Perahu Karet 6 org	6
		3 Perahu tempel	2
		4 Mesin perahu 20Pk	1
		5 Mesin perahu 15Pk	1
		6 Vertical Rescue	1
		7 Chain Saw	2
		8 Alat/Paket Pemadam Kebakaran	2
		9 Pompa Perahu	2
		10 Dayung	42
IV	**04**	**Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar**	
		1 WTP 250 lt	1
		2 Tenda Posko	2
		3 Tenda Keluarga	10
		4 Tenda Regu	
		5 Tenda Pleton	
		6 Tenda Pengungsi	5
		7 Velbed	5
		8 Tandon Air Plastik	10
V	**05**	**Alat berat**	
		1 Scope Loader	-
		2 Back Hoe	-
		3 Truck W Crane 3 Ton	-
		4 Tandem Vibration Roller 4 Ton	-
		5 Crane on Wheel 15 Ton	-
		6 Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3	-
		7 Head Tractor & trailer	-
		8 Loader	-
		9 Exavator	-
		10 Dump Truck	-
		11 Grader	-
		12 Bulldoser	-
		13 Ponton	-
		14 Vibro Hammer	-
		15 Wheel Loader	-
		16 Ulhantor Roller	-
VI	**06**	**Alat Penerangan dan kelistrikan**	
		1 Lampu Senter HID	2
		2 Genset 5 KVA	1

Dipindai dengan CamScanner

		3 Genset 10 KVA	1
		4 Genset 1,2 KW	
		5 Genset 1000 watt	1
		6 Kabel	
		7 Tiang Lampu Lapangan	1
		8 Emergency Lamp	
VII	**07**	**Alat Pergudangan**	
		1 Tabung Gas 12 Kg	4
		2 Tabung Gas 3 Kg	10
		3 Selang	10 rol
		4 Kompor	1
		5 Peralatan dapur umum	1
		Jumlah	

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional kepada unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu meliputi tugas koordinasi, komando, dan pelaksana dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan program penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
c. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi perangkat Daerah dan instansi pemerintah dalam penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pedoman penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

Dipindai dengan CamScanner

d. kebijakan pelaksanaan operasional di bidang penanggulangan bencana;
e. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi guna memperlancar kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
f. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
g. pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
h. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi sesuai dengan kebijakan standar operasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
i. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
j. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Wonosobo

1.5 Sistematika Penulisan

Bab II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra BPBD Kabupaten Wonosobo

2.2 Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo

Dipindai dengan CamScanner

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo

4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019, serta Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo. Penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Wonosobo

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan BPBD Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan.

1) Visi dan Misi

BPBD Kabupaten Wonosobo mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 dengan mewujudkan rencana strategis SKPD yang merupakan bagian integral dari visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Dipindai dengan CamScanner

A. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 yaitu " **TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA**".

B. Misi

Misi untuk mewujudkan **WONOSOBO BERSATU, UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA** yang akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

a) Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b) Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
c) Meningkatkan kemandirian daerah;
d) Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya; dan
e) Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

Dalam penjabaran Misi RPJMD, isu penanggulangan bencana ada pada koridor **misi kelima** yakni **"Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah"** dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berada di urusan **'Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri"**

Dalam pencapaian misi kelima tersebut ditetapkan tujuan Mewujudkan prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan sasaran Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi. Dalam Skema Besar RPJMD 2016 - 2021 secara jelas digambarkan manajemen penanggulangan bencana secara terpadu merupakan sasaran yang hendak dicapai.

Dipindai dengan CamScanner

2) Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

b. Sasaran

Adapun sasaran pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 adalah berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan indikator :

1. Persentase Jumlah kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana.
2. Persentase desa rawan bencana yang terpasang EWS (early warning system).
3. Persentase dokumen perencanaan kontigensi yang tersusun terhadap total jenis bencana.
4. Rapor ketangguhan bencana.
5. Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontigensi.
6. Persentase Desa Siaga Bencana.
7. Persentase Sekolah Tanggap Bencana.

Dipindai dengan CamScanner

8. Capaian pembentukan wilayah managemen kebakaran (WMK) pada lingkungan atas kawasan potensi kebakaran.
9. Cakupan pelayanan bencana kebakaran.
10. Tingkat Waktu Tanggap Respon (Response time rate) daerah layanan WMK.

3) Program Pembangunan dan Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo

a. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan yang tercantum pada RPJMD tahun 2016- 2021 adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
   Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
   a) Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor BPBD
   b) Penyusunan SOP
   c) Pengembangan PUSDALOP
   d) Penyusunan RAPERDA /RAPERBUB
   e) Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana.
   f) Penyusunan profil daerah rawan bencana.
   g) Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.
   h) Penyusunan peta jalur evakuasi.
   i) Peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana.
   j) Pengembangan system peringatan dini berbasis masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

k) Pengembangan kemitraan penanggulangan bencana berbasis komunitas.

l) Penyusunan review rencana kontigensi gunungapi sundoro.

m) Penyusunan rencana kontigensi bencana tanah longsor.

n) Fasilitasi penyusunan rapor ketangguhan bencana

o) Penyusunan dokumen rencana pengurangan resiko bencana.

3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

a) Penguatan desa siaga bencana.

b) Pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.

c) Pelatihan kesiapsiagaan bagi siswa dan guru di daerah rawan bencana.

d) Investigasi kejadian kebakaran.

e) Inspeksi peralatan proteksi pemadam kebakaran.

f) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

g) Penyediaan kebutuhan dasar dan trouma bagi korban bencana.

h) Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

4. Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

a) Peningkatan operasional sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

b) Pengadaan panic button bencana.

c) Penyusunan RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran).

d) Penyuluhan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran.

e) Pengadaan hidran umum dikawasan permukiman.

f) Kajian mitigasi bencana dan perkiraan iklim.

Dipindai dengan CamScanner

g) Penyusunan rencana kontigensi pengembangan system penopang dan penanggulangan bencana.
h) Pengadaan sarpras kebencanaan.
i) Pelaksanaan tanggap darurat bencana.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
   e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   g) Penyedian peralatan dan Perlengkapan kantor
   h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   i) Penyediaan Makanan dan Minuman
   j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
   l) Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS
   m) Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
   n) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan

6. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
   a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
   d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum.
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a) Pengadaan pakaian kerja BPBD
   b) Pengadaan Pakaian Dinas lapangan

Dipindai dengan CamScanner

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana.
2. Persentase desa rawan bencana yang terpasang EWS (early warning system).
3. Persentase dokumen perencanaan kontigensi yang tersusun terhadap total jenis bencana.
4. Rapor ketangguhan bencana.
5. Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontigensi.
6. Persentase Desa Siaga Bencana.
7. Persentase Sekolah Tanggap Bencana.
8. Capaian pembentukan wilayah managemen kebakaran (WMK) pada lingkungan atas kawasan potensi kebakaran.
9. Cakupan pelayanan bencana kebakaran.
10. Tingkat Waktu Tanggap Respon (Response time rate) daerah layanan WMK.

2.2. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

Dipindai dengan CamScanner

demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BPBD Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonosobo untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2019, sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi dan Mitigasi	Indek Resiko Bencana	124,6
		Rapor Ketangguhan Bencana	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	B

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 BPBD Kabupaten Wonosobo dalam koridor misi kelima yaitu "Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah", dengan sasaran strategis "Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi dan Mitigasi" yang mempunyai indikator pengurangan "Indeks Resiko Bencana".

Dipindai dengan CamScanner

Didalam Indeks Resiko Bencana terdapat indikator program yang perlu ditonjolkan yaitu Rapor Ketangguhan Bencana didalam hal kebencanaan juga disebut Indeks Ketahanan Daerah (IKD), kemudian indikator tersebut dinaikkan menjadi indikator sasaran.

Instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk itu BPBD Kabupaten Wonosobo menambahkan sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan", dengan indikator "Nilai Evaluasi SAKIP" didalam Perjanjian Kinerja.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2019, BPBD Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019, Rencana Strategis BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu :

Dipindai dengan CamScanner

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi dan Mitigasi.

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan upaya pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi guna mewujudkan tujuan strategis BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat dan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai hingga Tahun 2019, yaitu :

a. Indek Resiko Bencana.
b. Raport Ketangguhan Bencana.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja disajikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi dan Mitigasi	Indek Resiko Bencana	124,6	122,94	101,35%
		Rapor Ketangguhan Bencana	Baik (75)	Sedang (51)	68,00%

a. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana ini dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$R_{isk} = \frac{H_{azard} \times V_{ulneribility}}{C_{apacity}}$$

Di mana, Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

(1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
(3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
(4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
(5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
(6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
(7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Target dan Realisasi Indeks Resiko Bencana Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2019

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2016	132,4	135,20	97,93
2017	129,8	135,20	96,01
2018	127,2	122,94	103,47
2019	124,6	122,94	101,35

Sumber: Inarisk BNPB

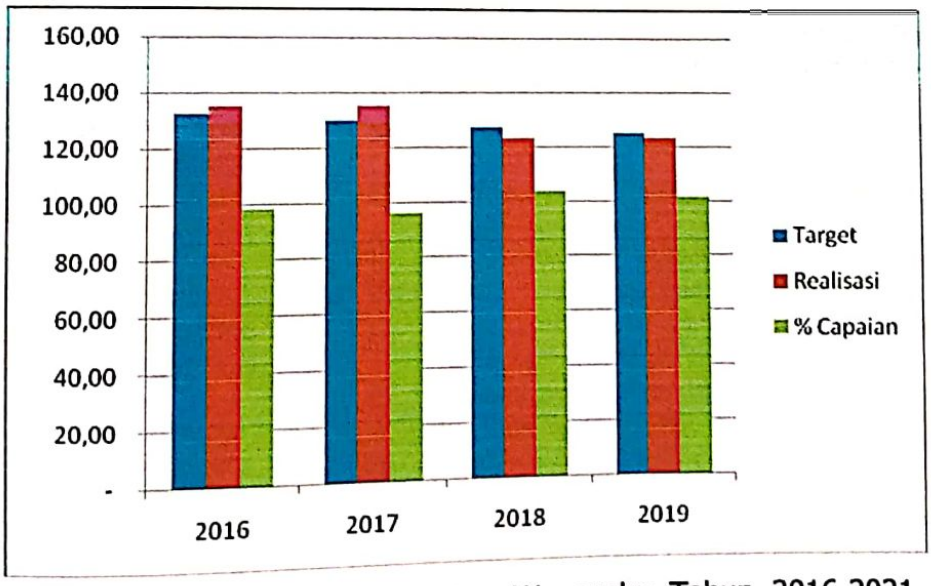

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, Indek Resiko Bencana target awal di tahun 2016 sebesar 132,4 dan target ahir Tahun 2021 sebesar 120. Target Tahun 2019 ditetapkan sebesar 124,6 dengan realisasi 122,94. Sehingga prosentase capaian indikator Indek

Dipindai dengan CamScanner

Resiko Bencana Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 sebesar 101,35% masuk kategori Sangat Baik.

Perbandingan realisasi Indeks Resiko Bencana Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 dengan Tahun 2019 mengalami stagnasi/tidak ada perubahan yaitu sebesar 122,94.

b. Rapor Ketangguhan Bencana

Indikator Rapor Ketangguhan Bencana 7 (tujuh) prioritas, yang mempunyai 71 (tujuh puluh satu) indikator dengan 284 (dua ratus delapan puluh empat) pertanyaan.

No.	PRIORITAS	INDIKATOR	
1	PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1	Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
		2	Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
		3	Peraturan Tentang Pembentukan Forum PRB
		4	Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
		5	Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
		6	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
		7	Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		8	Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana
		9	Komitmen DPRD terhadap PRB
2	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10	Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
		11	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
		12	Peta Kapasitas dan kajiannya
		13	Rencana Penanggulangan Bencana
3	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
		15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
		16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha
		17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
		18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
		19	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
		20	Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan
		21	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
		22	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan

Dipindai dengan CamScanner

		23	Penyimpanan/pergudangan Logistik PB
		24	Pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik yang diselenggarakan secara periodik
		25	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
		26	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
4	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27	Penataan ruang berbasis PRB
		28	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
		29	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
		30	Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana
5	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	31	Desa Tangguh Bencana
		32	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir
		33	Perlindungan daerah tangkapan air
		34	Restorasi Sungai
		35	Penguatan Lereng
		36	Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
		37	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
		38	Pemantauan berkala hulu sungai
		39	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
		40	Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
		41	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
		42	*Restorasi lahan gambut*
		43	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
6	PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	44	Rencana Kontijensi Gempabumi
		45	*Rencana Kontijensi Tsunami*
		46	*Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami*
		47	*Rencana Evakuasi Bencana Tsunami*
		48	Rencana kontijensi banjir
		49	Sistem peringatan dini bencana banjir
		50	Rencana kontijensi tanah longsor
		51	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
		52	Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan
		53	Sistem peringatan dini bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
		54	Rencana kontijensi erupsi gunungapi
		55	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
		56	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
		57	Rencana kontijensi kekeringan
		58	Sistem peringatan dini bencana kekeringan
		59	Rencana kontijensi banjir bandang
		60	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
		61	Penentuan Status Tanggap Darurat
		62	Penerapan sistem komando operasi darurat
		63	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
		64	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban

Dipindai dengan CamScanner

7	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	65	Perbaikan Darurat
		66	Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh
		67	Penghentian status Tanggap Darurat Bencana
		68	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
		69	Pemulihan infrastruktur penting
		70	Perbaikan rumah penduduk
		71	Pemulihan Penghidupan masyarakat

Nilai dari prioritas tersebut antara lain:

NO.	Tahun	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	IKD	KELAS
1	2013/ 2015	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	RENDAH
2	2016	0,62	0,30	0,52	0,65	0,78	0,36	0,31	0,51	SEDANG
3	2017	0,62	0,30	0,52	0,65	0,78	0,36	0,31	0,51	SEDANG
4	2018	0,62	0,30	0,52	0,65	0,78	0,36	0,31	0,51	SEDANG
5	2019	0,62	0,30	0,52	0,65	0,78	0,36	0,31	0,51	SEDANG

INDEKS PER PRIORITAS WONOSOBO TAHUN 2019

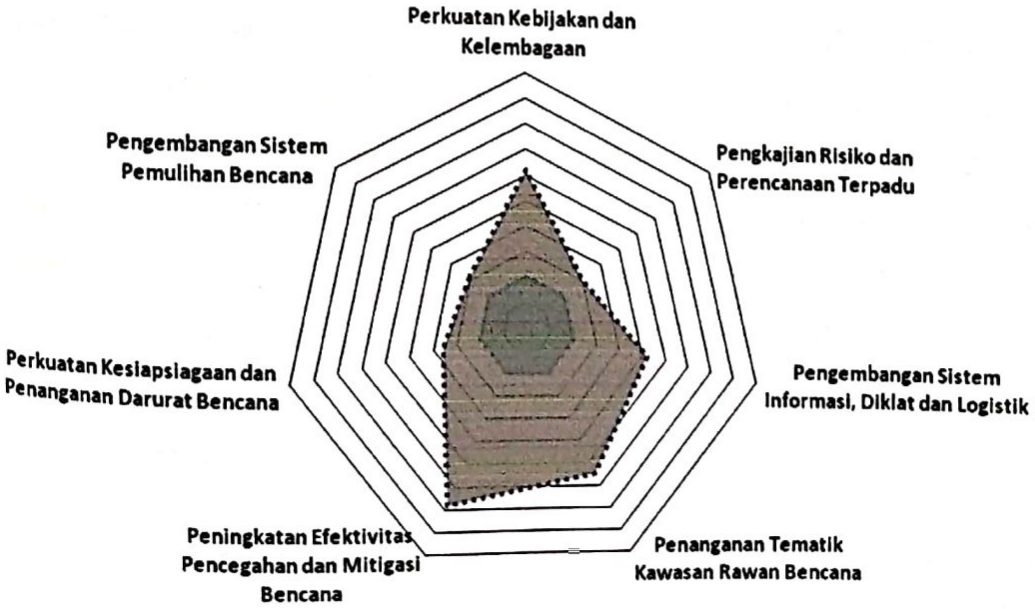

Dipindai dengan CamScanner

Rapor Ketangguhan Bencana Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dengan target Baik (75) realisasi Sedang (51), sehingga diperoleh % capaian sebesar 68% masuk kategori Cukup.

Melihat grafik diatas, nilai terendah ada di Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu yang kemudian di susul oleh Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Kedua prioritas tersebut perlu perhatian khusus untuk ditingkatkan.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan** BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP dengan target peringkat B (>60-70).

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP BPBD	B	-

Realisasi indikator Nilai Evaluasi SAKIP mengacu pada nilai Tahun 2018, dikarenakan SAKIP 2019 dalam proses penyusunan diawal tahun 2020. Realisasi nilai Evaluasi SAKIP tahun 2018 tidak punya nilai sehingga tidak diberi peringkat. BPBD Kabupaten Wonosobo sudah membuat SAKIP Tahun 2018, akan tetapi terlambat dalam menyerahkan laporan SAKIP dari tanggal yang telah ditentukan ke Inspektorat Kabupaten Wonosobo maupun ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

3.2 Realisasi Anggaran

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
I	**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**			
1	Penyusunan norma, standar, prosedur, dan	75.000.000	56.725.000	75,63

Dipindai dengan CamScanner

	manual pencegahan bahaya kebakaran			
2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	75.000.000	71.512.500	95,35
3	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	50.000.000	45.942.500	91,89
II	**Non Program**			
1	Non Kegiatan			
III	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.410.919.440	2.326.692.434	96,51
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000	9.000.000	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000	20.453.750	85,22
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.000.000	54.000.000	100,00
4	Penyediaan alat tulis kantor	28.403.200	28.403.200	100,00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.517.500	12.516.400	99,99
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.775.750	4.775.750	100,00
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.751.000	15.370.900	70,67
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.928.000	2.805.000	95,80
9	Penyediaan makanan dan minuman	37.475.000	31.225.000	83,32
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	357.425.350	337.671.386	94,47
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14.240.000	13.000.000	91,29
12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	18.000.000	18.000.000	100,00
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	106.370.000	83.279.000	78,29
IV	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			
1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2.000.000.000	1.992.556.900	99,63
2	Pengadaan mebeleur	200.000.000	199.195.500	99,60
3	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	50.000.000	49.713.000	99,43
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000	49.245.000	98,49
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	215.000.000	197.707.937	91,96
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	15.000.000	7.845.200	52,30
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat	-	-	
8	Penataan Lingkungan Kantor	200.000.000	199.060.181	99,53
9	Pemberian Extra Fooding Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran	23.940.000	21.840.000	91,23
V	**Program peningkatan disiplin aparatur**			
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	35.000.000	32.032.000	91,52
VI	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**			
1	Optimalisasi Penanggulangan Bencana	300.000.000	293.541.800	97,85
2	Operasi Tanggap Darurat Bencana	150.000.000	102.135.800	68,09
3	Pembinaan Relawan/SAR	200.000.000	190.398.400	95,20
4	Pengadaan Logistik	400.000.000	389.423.900	97,36
5	Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Tanah	200.000.000	175.647.400	87,82

Dipindai dengan CamScanner

	Longsor			
6	Pelatihan Jitu Pasna (pengkajian kebutuhan pasca bencana)	40.000.000	36.364.900	90,91
7	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Siswa dan Guru di daerah Rawan Bencana	200.000.000	176.871.945	88,44
8	Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	350.000.000	319.446.711	91,27
9	Penguatan dan Pengembangan Desa Siaga	400.000.000	390.959.800	97,74
	JUMLAH	8.330.745.240	7.955.359.194	95,49

BPBD Kabupaten Wonosobo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.330.745.240,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan Tunjangan	1.577.919.440	1.519.873.509	96,32
2.	Tambahan Penghasilan PNS	833.000.000	806.818.925	96,86
Total Belanja Pegawai		2.410.919.440	2.326.692.434	96,51

b. Belanja Langsung

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Modal)	5.919.825.800	5.628.666.760	95,08

Perbandingan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dengan 2018, dimana TA 2019 sebesar Rp. 7.955.359.194,- sedangkan TA 2018 sebesar Rp. 5.488.306.166,-

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional kepada unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu meliputi tugas koordinasi, komando, dan pelaksana dalam tahapan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat diresume sebagai berikut :

1. Hasil pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2019, yaitu :
   a. Indek Resiko Bencana : 101,35% (Sangat Baik);
   b. Rapor Ketangguhan Bencana : 68,00% (Cukup);
   c. Nilai Evaluasi SAKIP BPBD : - (Belum Dinilai)
2. Total realisasi belanja APBD pada Dinas BPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 sebesar Rp. 7.955.359.194,- atau tercapai 95,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 8.330.745.240,-.

4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo di masa mendatang, antara lain :

1. Terkait pencapaian Sasaran 1 :

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi dan Mitigasi yang mempunyai indikator Indeks Resiko Bencana dan Raport Ketangguhan Bencana, Raport Ketangguhan Bencana (capacity) merupakan salah satu bagian dari Indeks Resiko Bencana. Jadi jika nilai Raport Ketangguhan Bencana berubah maka otomatis Indeks Resiko Bencana berubah. Dari kedua indikator tersebut mempunyai 7 (tujuh) sasaran yang mempunyai 71 indikator sehingga masing – masing indikator mempunyai rekomendasi sebagai berikut:

No.	PRIORITAS	INDIKATOR	REKOMENDASI
1	PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1 Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
		2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	Peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dari tipe B ke tipe A yang diikuti dengan penguatan SDM dan anggaran
		3 Peraturan Tentang Pembentukan Forum PRB	Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB
		4 Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan	Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
		5 Peraturan Daerah tentang RPB	Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
		6 Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
		7 Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		8 Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana	Penguatan Forum PRB
		9 Komitmen DPRD terhadap PRB	Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam memperkuat Pengurangan Risiko Bencana di Daerah
2	PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
		11 Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
		12 Peta Kapasitas dan kajiannya	Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
		13 Rencana Penanggulangan Bencana	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah
		15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada	Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di

Dipindai dengan CamScanner

			tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	Lingkungannya
		16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga
		17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana
		18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional
		19	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
		20	Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan	Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
		21	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
		22	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	- Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah - Pembenahan dan perbaikan gedung logistik
		23	Penyimpanan/pergudangan Logistik PB	Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah
		24	Pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik yang diselenggarakan secara periodik	Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
		25	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
		26	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
4	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27	Penataan ruang berbasis PRB	Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
		28	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah
		29	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
		30	Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana	Penguatan 4 Modul Safety Hospital pada Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana pada Daerah Berisiko
		31	Desa Tangguh Bencana	Pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana
5	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori

Dipindai dengan CamScanner

		33	Perlindungan daerah tangkapan air	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
		34	Restorasi Sungai	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
		35	Penguatan Lereng	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
		36	Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	-
		37	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana
		38	Pemantauan berkala hulu sungai	Penguatan Kerjasama Lintas Batas dan sektoral untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang
		39	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi	Sosialisasi model bangunan tahan gempa
		40	*Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami*	-
		41	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir
		42	*Restorasi lahan gambut*	-
		43	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Upaya menjaga kelestarian vegetatif DAS
6	PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	44	Rencana Kontijensi Gempabumi	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi
		45	*Rencana Kontijensi Tsunami*	-
		46	*Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami*	-
		47	*Rencana Evakuasi Bencana Tsunami*	-
		48	Rencana kontijensi banjir	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
		49	Sistem peringatan dini bencana banjir	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah
		50	Rencana kontijensi tanah longsor	Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya untuk Penanganan Darurat bencana Tanah Longsor berdasarkan Perencanaan Kontijensi
		51	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah
		52	Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
		53	Sistem peringatan dini bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah
		54	Rencana kontijensi erupsi gunungapi	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunungapi melalui Perencanaan Kontijensi

Dipindai dengan CamScanner

		55 Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana erupsi gunungapi Daerah
		56 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi
		57 Rencana kontijensi kekeringan	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
		58 Sistem peringatan dini bencana kekeringan	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah
		59 Rencana kontijensi banjir bandang	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi
		60 Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah
		61 Penentuan Status Tanggap Darurat	Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana
		62 Penerapan sistem komando operasi darurat	Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
		63 Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana
		64 Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
		65 Perbaikan Darurat	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana
		66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana
		67 Penghentian status Tanggap Darurat Bencana	Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana
7	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
		69 Pemulihan infrastruktur penting	Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana
		70 Perbaikan rumah penduduk	Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana
		71 Pemulihan Penghidupan masyarakat	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana

2. Terkait pencapaian Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan yang mempunyai indikator Nilai Evaluasi SAKIP.

   Penyusunan dokumen-dokumen dan pelaporan-pelaporan kedinasan tepat waktu, untuk itu BPBD sangant memerlukan:

   a. Penambahan ASN di Sekretariat untuk menangani Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan (PPEP) dan menopang mekanisme pelaksanaan berbagai program dan kegiatan;

   b. Mengikutsertakan ASN dalam pelatihan PPEP dan berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk memenuhi berbagai indikator tersebut sangat diperlukan dungan kebijakan yang semakin kuat terutama dari Pemerintah Kabupaten dan stakeholder terkait. Hal ini mengingat peran strategis dan sekaligus berat yang diampu oleh BPBD. Berbagai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor tidak pernah bisa terlepas dari resiko terlanda dan terdampak bencana. Dukungan tersebut antara lain berupa peningkatan kuantitas dan kualitas personel/SDM, penguatan anggaran dalam rangka pemenuhan kegiatan-kegiatan Pra, Kedaruratan maupun Pasca Bencana serta pemenuhan berbagai sarana dan prasarana pendukung operasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Wonosobo, Pebruari 2020

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Wonosobo

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ZULFA AKHSAN ALIM KURNIAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19751127 199511 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFA AKHSAN ALIM KURNIAWAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : EKO PURNOMO, SE., MM
Jabatan : Bupati Wonosobo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
EKO PURNOMO, SE., MM	ZULFA AKHSAN ALIM K, S.STP, M.Si
	NIP. 19761127 199511 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana Melalui Adaptasi dan Mitigasi	Indek Resiko Bencana	122
		Rapor Ketangguhan Bencana	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Penopang dan Layanan Kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	713.455.350,00	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	482.840.000,00	
3.	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100.000.000,00	
4.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.530.000.000,00	
5.	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	300.000.000,00	

Wonosobo, Januari 2020

Bupati Wonosobo,

EKO PURNOMO, SE., MM

Kepala Pelaksana BPBD,
Kabupaten Wonosobo

ZULFA AKHSAN ALIM K, S.STP, M.Si
NIP. 19761127 199511 1 001

Dipindai dengan CamScanner